



# NASKAH AKADEMIK SEKOLAH MENENGAH ATAS



***Visi Kementerian Pendidikan Nasional:***

“Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat  
(Insan Kamil/Insan Paripurna)”

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN**

**Jakarta, 2011**



---

# **NASKAH AKADEMIK SEKOLAH MENENGAH ATAS**

---

***Visi Kementerian Pendidikan Nasional:***

“Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat  
(Insan Kamil/Insan Paripurna)”

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN  
Jakarta, 2011**

Penulis:

Dr. Hermana Somantrie, M.A. (Puskurbuk Balitbang Kemdiknas)

[© *Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang*]

Kontributor:

1. Prof. Dr. Mukhlis R. Luddin (UNJ)
2. Prof. Dr. Prayitno (UNP)
3. Dr. Ahmad Ridwan, M.Sc. (ITB)
4. Dr. Iwan Pranoto (ITB)
5. Dr. Anggraini Barlian (ITB)
6. Dr. Asep Supriyatna (UPI)
7. Dr. Azis Mahfuddin, M.Pd. (UPI)
8. Clara, M.Psi. (Unika Atmajaya)
9. Dr. Lambas, M.Sc. (Puskurbuk Balitbang Kemdiknas)
10. Dra. Elly Marwati, M.Si. (PuskurbukBalitbang Kemdiknas)
11. Ratna Yulianti, S.T. (Kasek SMA Madania Parung)
12. Capri Anjaya, SPd., M.Hum. (Kepala Sekolah Tiara Bangsa - ACS Jakarta)
13. Gregorius Winarno, SPd., M.A. (Kepala Sekolah Bina Nusantara Simprug)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan “Naskah Akademik Satuan Pendidikan” sebagai penjabaran dari Naskah Akademik Penataan Ulang Kurikulum yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan naskah akademik tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti program-program prioritas yang dimuat, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 maupun dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014.

Naskah Akademik Satuan Pendidikan yang telah disusun oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan adalah sebagai berikut :

1. Naskah Akademik Pendidikan Anak Usia Dini
2. Naskah Akademik Sekolah Dasar
3. Naskah Akademik Sekolah Menengah Pertama
4. Naskah Akademik Sekolah Menengah Atas
5. Naskah Akademik Sekolah Menengah Kejuruan
6. Naskah Akademik Program Khusus
7. Naskah Akademik Pendidikan Non Formal

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan pemikiran dalam mewujudkan naskah akademik ini. Dengan kerendahan hati, kami mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dalam rangka pemantapan dan penyempurnaannya. Semoga upaya ini bisa menjadi salah satu unsur yang signifikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan  
Perbukuan,

Dra. Diah Harianti, M.Psi  
NIP. 195504161983032001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Bab I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Fungsi dan Tujuan	3
	C. Cakupan Naskah Akademik	4
Bab II	LANDASAN PENATAAN ULANG KURIKULUM	5
	A. Landasan Yuridis	5
	B. Landasan Teoritis	5
Bab III	KAJIAN EMPIRIK KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERLAKU SAAT INI	15
	A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	15
	B. Layanan Pendidikan	19
	C. Sistem Pembelajaran	20
	D. Sistem Penilaian	20
Bab IV	KAJIAN EMPIRIK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERLAKU SAAT INI	22
	A. Standar Kompetensi Lulusan	22
	B. Standar Isi	23
Bab V	RANCANGAN BARU KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS DI MASA YANG AKAN DATANG	25
	A. Kerangka Dasar Kurikulum	25
	B. Struktur Kurikulum	26
	C. Beban Belajar Dengan Sistem Kredit Semester	28
	D. Sistem Pembelajaran	33

	E. Sistem Penilaian	34
	F. Kalender Akademik	35
	G. Pengelolaan Kurikulum	37
Bab VI	RANCANGAN BARU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS	38
	A. Rancangan Baru Standar Kompetensi Lulusan	38
	B. Rancangan Baru Standar Isi	40
Bab VII	PENGUATAN TERHADAP KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERLAKU SAAT INI	41
	A. Penerapan Metodologi Pembelajaran Aktif	41
	B. Pengintegrasian Pendidikan Karakter	41
	C. Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	43
Bab VIII	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	47
	A. Rekomendasi	47
	B. Tindak Lanjut	47
	DAFTAR PUSTAKA	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional (Renstra Kemdiknas) 2010-2014 menjadi kebijakan utama dalam penataan ulang kurikulum sekolah dan penguatan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Peraturan-peraturan tersebut yaitu: pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 telah menetapkan sebanyak 6 substansi inti program aksi bidang pendidikan sebagaimana yang disajikan dalam cuplikan dokumen tersebut sebagai berikut.

Ilustrasi 1: Substansi Inti Program Aksi Bidang Pendidikan RPJMN Tahun 2010-2014

---

#### Prioritas 2: Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Akses pendidikan dasar-menengah: Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMA dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;
2. Akses pendidikan tinggi: Peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di 2014;
3. Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar dan menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014;
4. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten;
5. Kurikulum: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (di antaranya dengan mengembangkan model *link and match*);
6. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT

---

masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMA& MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

---

[Sumber: RPJMN 2010-2014]

Substansi inti program aksi yang berkaitan dengan kurikulum adalah poin yang ke-5, yaitu: “penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*).”

Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 memuat berbagai kebijakan yang terkait dengan penguatan kurikulum sebagaimana disajikan dalam cuplikan dokumen tersebut sebagai berikut.

Ilustrasi 2: Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014

---

## **4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014**

### **4.2.4 Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa**

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan *soft skills* yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- (3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- (4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

### **4.2.5 Pengembangan Metodologi Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha**

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;
-



- 
- (2) Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;
  - (3) Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan;
  - (4) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
  - (5) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif;
  - (6) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif;
  - (7) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.
- 

[Sumber: Renstra Kemdiknas 2010-2014]

Substansi inti program aksi yang berkaitan dengan penguatan kurikulum yaitu penerapan metodologi pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik dan pengintegrasian karakter bangsa, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif terhadap pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku saat ini.

Pemerincian (*detailing*) lebih lanjut secara konseptual dan operasional mengenai kedua peraturan tersebut di atas ditugaskan kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) sebagai salah satu pusat dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional. Atas dasar itu, Puskurbuk perlu melakukan penyiapan program sebagai berikut:

- a. penataan ulang kurikulum untuk mewujudkan pengelolaan kurikulum yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah; dan
- b. penguatan kurikulum yang berlaku saat ini melalui penerapan metodologi pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik, pendidikan karakter dan budaya, pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan ekonomi kreatif.

Penataan ulang kurikulum yang mencakup penguatan kurikulum harus dilakukan secara konseptual, sistemik, dan sistematis agar hasilnya berkualitas dan berdayaguna bagi peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan pemberdayaan potensi diri peserta didik pada khususnya. Sehubungan dengan hal tersebut, penataan ulang kurikulum di Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu disusun dalam bentuk "Naskah Akademik Penataan Ulang Kurikulum SMA", yang di dalamnya mencakup penguatan kurikulum yang berlaku saat ini.

## **B. Fungsi dan Tujuan**

### **1. Fungsi**

Naskah Akademik Penataan Ulang Kurikulum berfungsi mewujudkan suatu rancangan dasar penataan ulang kurikulum SMA, yang memuat pemikiran konseptual bagi kurikulum SMA masa depan dengan berdasarkan pada kajian empirik pelaksanaan kurikulum dan unsur relevan lainnya yang berlaku saat ini.

### **2. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dengan melalui naskah akademik ini yaitu menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang akan digunakan bagi penyempurnaan kurikulum SMA beserta unsur relevan lainnya dalam rangka peningkatan mutu proses dan hasil pendidikannya di masa depan, yang akan datang harus dapat memberikan gambaran bagaimana peserta didik dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-budaya.

### **C. Sistematika Naskah Akademik**

Naskah akademik ini terurut secara substansial-konseptual, sistematis, dan sistemik yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- pendahuluan
- landasan penataan ulang kurikulum
- kajian empirik kurikulum yang berlaku saat ini
- kajian empirik standar kompetensi lulusan dan standar isi yang berlaku saat ini
- rancangan baru kurikulum di masa yang akan datang
- rancangan baru standar kompetensi lulusan dan standar isi
- penguatan terhadap kurikulum yang berlaku saat ini
- rekomendasi dan tindak lanjut

## **BAB II**

### **LANDASAN PENATAAN ULANG KURIKULUM**

#### **A. Landasan Yuridis**

Penataan ulang terhadap Kurikulum Sekolah Menengah Atas dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 18 mengatur bahwa:

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 1 Ayat (13) mengatur bahwa:

Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2010. Dengan mulai berlakunya peraturan baru ini, semua aturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, pengelolaan dan penyelenggaraan SMA yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **B. Landasan Teoritis**

##### **1. Hakikat Kurikulum**

Hakikat kurikulum di negara mana pun di dunia ini secara prinsip mempunyai kesamaan, yaitu kurikulum sebagai cetak biru (*blueprint*) proses pembelajaran yang berupa seperangkat rencana untuk membangun dan memberdayakan potensi peserta

didik. Sedangkan, perbedaan kurikulum yang dikembangkan di setiap negara adalah muatan dalam kurikulum. Perbedaan muatan disebabkan oleh filosofi dan kepercayaan (*beliefs*), konteks, dan kondisi yang dimiliki dan dihadapi oleh masing-masing negara.

Banyak pengertian kurikulum yang bisa ditemukan dalam berbagai referensi, namun untuk kepentingan di sini hanya akan dikemukakan beberapa pengertian sesuai dengan kebutuhan. Menurut Glatthorn (1987) mengatakan bahwa: *in a sense, the task of defining the concept is perhaps the most difficult of all, for the term curriculum has been used with quite different meanings ever since the field took form* ---pada intinya tugas untuk mendefinisikan konsep mungkin hal yang paling sulit, bagi istilah kurikulum telah digunakan dengan sangat berbeda pengertiannya sejak bidang ini terbentuk. Miller & Seller (1985) mengartikan bahwa *curriculum is an explicitly and implicitly intentional set of interactions designed to facilitate learning and development and to impose meaning on experience*---kurikulum adalah suatu himpunan yang dikehendaki/diharapkan secara eksplisit dan implisit, dirancang untuk memudahkan belajar dan pengembangan dan untuk mengharapakan makna pada pengalaman. Selanjutnya Miller & Seller menyatakan bahwa *the explicit intentions usually are expressed in the written curriculum as courses of study; the implicit intentions are found in the hidden curriculum*” ---harapan yang eksplisit biasanya dinyatakan dalam kurikulum tertulis sebagai mata pelajaran; harapan implisit ditemukan dalam kurikulum tersembunyi.

Armstrong (1989) mengartikan bahwa: *(a) curriculum is the school's adopted program of studies; (b) curriculum consists of contents of the various courses taught in the school; (c) curriculum involves planned interactions among instructors, learners, and learning resources in the school or in other appropriate instructional settings; (d) curriculum encompasses all of the experiences offered to learners under the authority of the school or under the authority of other appropriate instructional agencies; and (e) curriculum includes all planned and unplanned experiences of learners in the school and in other appropriate instructional settings* ---(a) kurikulum adalah program studi yang diadopsi oleh sekolah; (b) kurikulum terdiri atas konten berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah; (c) kurikulum mencakup interaksi terencana diantara guru, peserta didik, dan sumber daya belajar di dalam sekolah atau di dalam tempat pembelajaran yang sesuai; (d) kurikulum mencakup semua pengalaman yang ditawarkan kepada peserta didik di bawah kewenangan sekolah atau di bawah kewenangan agen pembelajaran lain yang sesuai; dan (e) kurikulum mencakup semua pengalaman peserta didik yang direncanakan dan tidak direncanakan di sekolah dan di tempat pembelajaran yang sesuai.

Dengan demikian, menurut Glatthorn (1987) bahwa *it would seem that a useful definition of curriculum should meet two criteria: it should reflect the general understanding of the term as used by educators; and it should be useful to educators in making operational distinctions* ---tampak bahwa definisi kurikulum harus sesuai dengan dua kriteria: (1) harus mencerminkan pemahaman umum istilah sebagaimana yang digunakan oleh pendidik; dan (2) harus bermanfaat bagi pendidik dalam membuat perbedaan operasional. Selanjutnya, Glatthorn sendiri mengusulkan definisi kurikulum adalah *the plans made for guiding learning in the schools, and the actualization of those plans in the classroom, as experienced by the learners and as recorded by an observer; those experiences take place in a learning environment which also influences what is learned* ---rencana yang dibuat untuk membimbing

belajar di sekolah, dan aktualisasi rencana tersebut di dalam kelas, sebagaimana yang dialami oleh peserta didik dan dicatat oleh seorang pengamat; pengalaman tersebut terjadi di lingkungan belajar yang juga mempengaruhi apa yang dipelajari.

Jadi, hakikat kurikulum adalah rencana awal yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang mudah ditemukan, disusun berdasarkan pada tingkat-tingkat generalisasi dan perkembangan peserta didik, dapat diaktualisasikan di dalam pembelajaran, dapat diamati oleh pihak yang tidak berkepentingan sekalipun, dan membawa misi perubahan tingkah laku. Kurikulum sebagai suatu bentuk rencana harus fleksibel agar bisa memberi kemungkinan setiap saat untuk dilakukan perbaikan seperlunya dalam proses implementasinya. Kurikulum sebagai suatu bentuk dokumen harus memberikan petunjuk yang cukup rinci mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah dan guru dan juga dapat disimpan dalam perangkat komputer yang bisa diakses oleh berbagai pihak melalui jaringan internet.

Untuk kepentingan pendidikan di Indonesia, kurikulum telah didefinisikan secara formal sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum adalah "*seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.*"

## **2. Hakikat Satuan Pendidikan SMA**

Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

Berdasarkan ketentuan tersebut, SMA pada hakikatnya merupakan satuan pendidikan yang berfungsi untuk menyelenggarakan "pendidikan bersifat umum". Yang dimaksud dengan pendidikan bersifat umum yaitu pendidikan yang menyediakan kurikulum dengan sejumlah bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan "*the student's rational thought and general intellectual capabilities*" ---pemikiran rasional dan kemampuan intelektual umumpeserta didik. Melalui pendidikan umum, peserta didik diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk menggali, mengolah, dan menggunakan informasi (*well-informed person*) yang dimuat dalam berbagai bahan kajian dan pelajaran melalui pemikiran dan diskusi rasional.

Dengan demikian, pendidikan bersifat umum berbeda dengan pendidikan yang menekankan pada sifat profesional, vokasional, atau teknikal. Dalam konteks universal, bahan kajian dan pelajaran bagi satuan pendidikan bersifat umum (*liberal arts education*) dikelompokkan ke dalam bidang keilmuan: *Humanities* (Humaniora); *Language & Arts* (Bahasa dan Seni); *Mathematics* (Matematika); *Natural Sciences* (Ilmu-ilmu Alam); *Social Sciences* (Ilmu-ilmu Sosial); dan *Physics and Health* (Jasmani dan Kesehatan). Sebagai salah satu contoh pengguna pendidikan bersifat umum yaitu Amerika Serikat, karena menurut Jerald (2009) bahwa *one of the great attributes of a liberal arts education is preparing people to learn how to learn*---

salah satu tanda besar dari suatu pendidikan umum adalah mempersiapkan orang untuk belajar bagaimana untuk belajar.

Pendidikan SMA di Indonesia pun bisa menggunakan *liberal arts education* yang pemilihan mata-mata pelajarannya diserahkan kepada para peserta didik dalam rangka pemberdayaan potensinya masing-masing sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat, kecuali mata-mata pelajaran yang sifatnya membangun karakter bangsa atau wawasan kebangsaan harus diwajibkan untuk dipelajari oleh seluruh peserta didik [agama, Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah nasional, dan bahasa Indonesia].

### 3. Karakteristik Peserta Didik SMA

Peserta didik SMA adalah mereka yang berusia antara 16 dan 18 tahun di mana pada usia ini sedang berada pada fase remaja [10 dan 19 tahun]. Masa remaja (*adolescence*) adalah periode peralihan atau perkembangan dari masa kekanakan (*childhood*) menuju masa dewasa (*adulthood*). Seseorang yang berada pada masa remaja ini ditandai antara lain dengan pubertas (keinginan untuk mendekat ke lawan jenis) dan pencarian jati diri, Berkenaan dengan hal itu, Arnett (1999) mengatakan bahwa *G. Stanley Hall (1904) proposed that adolescence is inherently a time of storm and stress. Conflict at this stage of development is normal and unusual ---* bahwa masa remaja terkait dekat dengan masa gejolak dan stress. Konflik pada tahap perkembangan ini merupakan sesuatu yang normal dan biasa. Namun demikian, menurut Arnett bahwa *Hall's view continues to be addressed by psychologists. For the most part, contemporary psychologists reject the view that adolescent storm and stress is universal and inevitable ---* pandangan Hall terus dibicarakan oleh para psikolog. Sebagai besar dari psikolog kontemporer menolak pandangan gejolak dan stress remaja adalah universal dan tidak nyata.

Masa remaja usia 16 – 18 tahun menurut teori perkembangan kognitif Piaget (1958) sebagaimana dikutip dalam Good & Broophy (1990) adalah *the period of formal operation that begins at about age twelve and gradually consolidates over the next several years. Much is involved in this transformation, but the hallmark is the development of the ability to think in symbolic terms and comprehend content meaningfully without requiring physical objects or previous experience with such objects ---* periode *formal operation* yang dimulai pada usia 12 tahun secara bertahap menguat pada beberapa tahun mendatang. Banyak yang tercakup dalam transformasi ini, tetapi cirinya adalah perkembangan kemampuan untuk berpikir dalam istilah simbolik dan memahami konten secara bermakna tanpa memerlukan objek fisik atau pengalaman sebelumnya dengan objek semacam itu.

Jelasnya bahwa peserta didik SMA berada pada transformasi dari masa remaja menuju ke masa dewasa. Proses transformasi pada umumnya sering memunculkan berbagai fenomenakejiwaan dan fisik seperti gejolak, stres, pubertas, pencarian jati diri, dan perkembangan tubuh. Oleh karenanya pada proses tersebut peserta didik SMA ditandai dengan sering memberontak, melawan, atau hal-hal lainnya yang mengarah pada pemunculan, penguatan, dan pertahanan diri. Selain itu, peserta didik SMA memiliki tingkat kemampuan berpikir abstrak dan memaknai suatu obyek tanpa memerlukan kehadiran fisiknya atau bahkan pengalaman sebelumnya.

#### **4. Fungsi dan Tujuan Satuan Pendidikan SMA**

##### **a. Fungsi**

Pendidikan di SMA berfungsi mewujudkan potensi dan membentuk karakter peserta didik sebagai warga negara Indonesia untuk menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peduli (peka) sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

##### **b. Tujuan**

Pendidikan di SMA bertujuan agar peserta didik berkemampuan untuk:

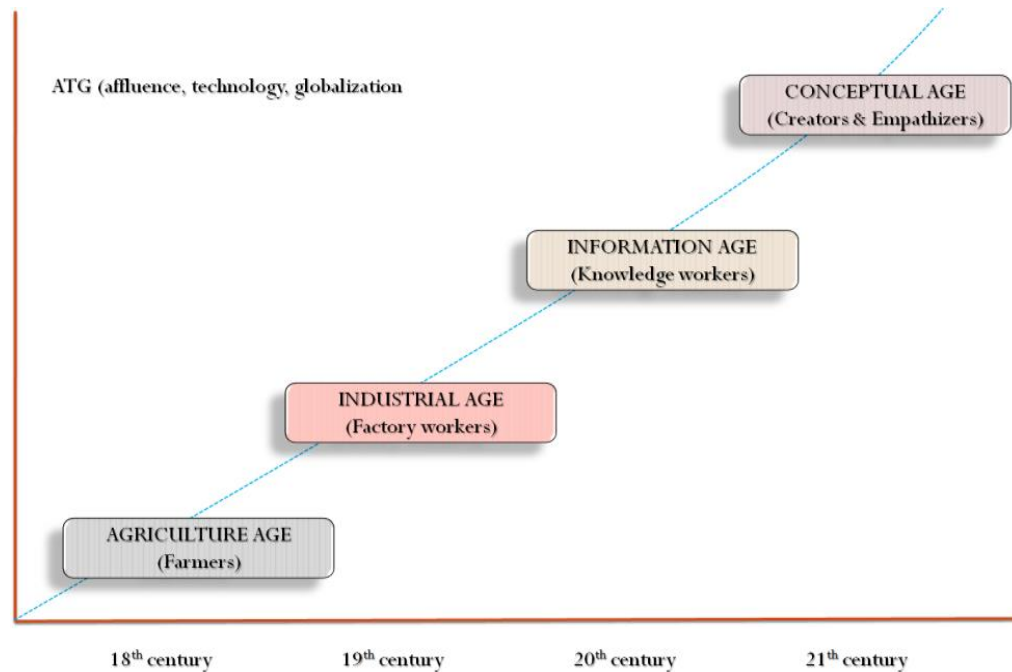
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi;
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat;
- g. menjadi warga negara yang demokratis, taat hukum, dan *well-informed* dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan kehidupan global yang selalu berubah.

#### **5. Tuntutan Pengembangan Potensi Diri**

Banyak hal perlu dipertimbangkan dalam upaya penataan ulang kurikulum yang dipersiapkan, terutama bagi pengembangan potensi diri peserta didik pada abad ke-21 ini, yang oleh Pink (2006) disebut sebagai “*the conceptual era*” atau era konseptual. Manusia yang ingin memimpin dalam era ini menurut Pink perlu memiliki “Six High-Concept And High-Tought Senses In The Conceptual Age”:(1) *Not just function but also DESIGN*; (2) *Not just argument but also STORY*; (3) *Not just focus but also SYMPHONY*; (4) *Not just logic but also EMPHATY*; (5) *Not just seriousness but also PLAY*; and (6) *Not just accumulation but also MEANING* ---(1) tidak hanya fungsi tetapi juga bentuk; (2) tidak hanya alasan tetapi juga cerita; (3) tidak hanya memusat tetapi juga harmonis; (4) tidak hanya logis tetapi juga berperasaan; (5) tidak hanya serius tetapi juga bermain; dan (6) tidak hanya pengumpulan tetapi juga pemaknaan.

Perkembangan masyarakat mulai dari masyarakat agraris sampai dengan masyarakat konseptual sebagaimana yang dikemukakan oleh Pink tampak dalam Ilustrasi 3 berikut ini.

Ilustrasi 3: Perkembangan Masyarakat Dunia dari Abad ke-18 sampai ke Abad ke-21.



[Sumber: Pink (2006)]

Dalam era konseptual menurut Wagner (2008) akan terjadi *global achievement gap* (kesenjangan prestasi global), yaitu: *the gap between what even our best suburban, urban, and rural public schools are teaching and testing versus what all students will need to succeed as learners, workers, and citizens in today's global knowledge economy* ---kesenjangan antara apa yang terbaik dalam sekolah publik adalah pembelajaran dan ujian versus apa yang akan diperlukan peserta didik untuk berhasil sebagai pelajar, pekerja, dan warga negara dalam ekonomi pengetahuan global masa kini. Oleh karena itu orang Amerika Serikat, selanjutnya menurut Wagner, sangat berkepentingan untuk memiliki *the Seven Survival Skills for the twenty-first century*: (1) *critical thinking and problem solving*; (2) *collaboration across networks and leading by influence*; (3) *agility and adaptability*; (4) *initiative and entrepreneurialism*; (5) *effective oral and written communication*; (6) *accessing and analyzing information*; and (7) *curiosity and imagination* ---(1) berpikir kritis dan penyelesaian masalah; (2) bekerjasama lintas jaringan dan memimpin dengan pengaruh; (3) penghargaan dan penyesuaian; (4) inisiatif dan kewirausahaan; (5) komunikasi lisan dan tulisan afektif; (6) menilai dan mengkaji informasi; (7) keingintahuan dan imajinasi.

Sedangkan, Trilling & Fadel (2009) mengutarakan bahwa pada abad ke-21 diperlukan *the 21<sup>st</sup> century skills*: (1) *thinking critically and making judgments*; (2) *solving*



*complex, multidisciplinary, open-ended problems that all workers, in every kind of workplace, encounter routinely; (3) creativity and entrepreneurial thinking—a skill set highly associated with job creation; (4) communicating and collaborating with teams of people across cultural, geographic and language boundaries—a necessity in diverse and multinational workplaces and communities; (5) making innovative use of knowledge, information and opportunities to create new services, processes and products; and (6) taking charge of financial, health and civic responsibilities and making wise choices* ---(1) berpikir secara kritis dan membuat pertimbangan; (2) menyelesaikan segala permasalahan kompleks dan multidisipliner yang ditemukan para pekerja secara rutin; (3) berpikir kreatif dan berwirausaha, serangkaian keterampilan berkenaan dengan penciptaan pekerjaan; (4) berkomunikasi dan bekerjasama dengan tim lintas batasan budaya, geografi, dan bahasa; (5) membuat penggunaan pengetahuan inovatif, informasi, dan peluang untuk menciptakan layanan baru, proses dan produk; dan (6) bertanggung jawab dan membuat pilihan yang bijak.

Mengapa memerlukan *the 21<sup>st</sup> century skills* khususnya pada tingkat SMA? Hal itu menurut Jerald (2009) bahwa:*the service sector jobs will be growing, including lower-wage service jobs. As the Baby Boom generation ages, for example, there will be greater demand for elderly care workers. Such jobs cannot be automated. However, high-wage work will increasingly require more education, and the retirement of older workers also increases the demand for skilled workers to replace many of them* ---pekerjaan sektor layanan akan tumbuh, mencakup pekerjaan layanan upah-rendah. Misalnya, pada zaman generasi “ledakan bayi” akan menuntut pekerja pengasuhan, pekerjaan seperti ini tidak bisa otomatis. Pekerjaan upah-tinggi akan memerlukan pendidikan lanjutan, dan pekerja yang pension menambah tuntutan bagi para pekerja terampil yang akan menggantikan mereka.

Ilustrasi 4: Duapuluh Jenis Pekerjaan dengan Pertumbuhan yang paling Cepat dan yang akan manambah pekerjaan yang sudah ada

<b>Twenty occupations with fastest rate of growth</b>	<b>Twenty occupations that will add the most jobs</b>
Network systems and data communications analysts Personal and home care aides Home health aides Computer software engineers, applications Personal financial advisors Veterinary technologists and technicians Makeup artists, theatrical and performance Medical assistants Veterinarians Substance abuse and behavioral disorder counselors	Registered nurses Retail salespersons Customer service representatives Combined food preparation and serving workers Office clercks, general Personal and home care aides Home health aides Postsecondary teachers Janitors and cleaners, except maids and housekeeping Nursing aides, orderlies, and attendants

Skin care specialists	Bookkeeping, accounting, and auditing clercks
Financial analysts	Waiters and waitresses
Social and human service assistants	Chold care workers
Gaming surveillance officers and gaming investigators	Executive secretaries and administrative assistants
Physical therapist assistants	Computer software engineers, applications
Pharmacy technicians	Accountants and auditors
Forensic science technicians	Landscaping and groundskeeping workers
Dental hygienists	Elementary school teachers, except special education
Mental health counselors	Receptionists and information clercks
Mental health and substance abuse social workers	Truck drivers, heavy and tractor-trailer

Sumber: Dohm, A. & Shniper, L. (2007).

Jenis pekerjaan di atas pada umumnya memerlukan tenaga lulusan sekolah menengah atau pasca sekolah menengah dan hanya sedikit yang lulusan di atas sekolah menengah.

## 6. Lingkungan Belajar SMA yang Ideal

Mengingat peserta didik SMA berada pada masa remaja, lingkungan belajar di SMA harus memenuhi persyaratan terutama bagi pelaksanaan pembelajaran dalam rangka pemberdayaan potensi peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya yang disertai dengan pertumbuhan secara emosional, sosial, fisikal, dan akademikal.

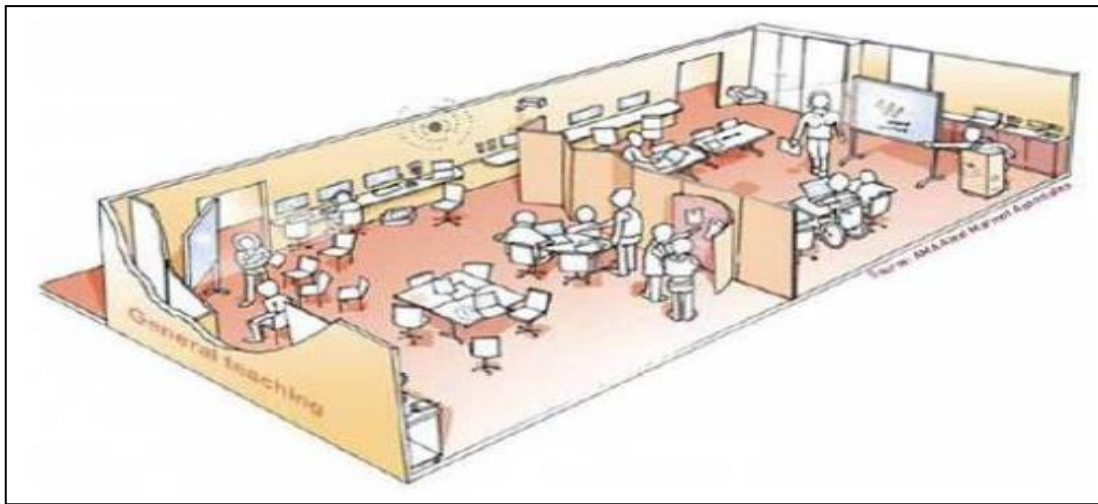
Istilah “learning environment” perlu lebih diberdayakan lagi pada abad ke-21 karena pada abad ini belajar lebih menekankan pada *interconnected and technology-driven world, a learning environment can be virtual, online, remote* ---dunia yang saling tersambung dan dilengkapi dengan teknologi, lingkungan belajar dapat secara maya, tersambung dengan internet, dan jarak jauh. Jadi, sebenarnya belajar dapat dilakukan tidak hanya di dalam kelas semata-mata. Inilah keunikan belajar pada abad ke-21 yang perkembangannya perlu diantisipasi sejak awal.

Berkenaan dengan itu, Sammon (1999) mengatakan bahwa *inherent in these and other 21st century designs is the notion of buildings that flex to accommodate the human relationships that are critical to successful learning. As a leading school architect has noted, schools must “create an environment where the kids know each other and know their instructors, not just academically but as people”* ---bangunan pada abad ke-21 yang mengikat untuk mengakomodasi hubungan manusiawi yang penting bagi keberhasilan belajar. Sekolah harus menciptakan suatu lingkungan di mana anak-anak tahu setiap orang lainnya dan tahu guru mereka, tidak hanya sebagai manusia secara akademik. Selanjutnya, Sammon menyatakan bahwa: *school designs that convey friendliness, openness, and accessibility promote cooperation and interaction, and reduce the tensions that can lead to inattentiveness, acting up, and bullying. What goes for kids, goes for adults, too? Educators need tools and spaces that enable collaborative planning and information sharing* ---bangunan sekolah yang menunjukkan persahabatan, keterbukaan, dan kemudahan mendorong

kerjasama dan interaksi, dan mengurangi tekanan yang dapat membawa ketidakpedulian, berperilaku buruk, dan pelecehan. Apa yang terjadi pada anak, terjadi pada orang tua juga? Pendidik perlu perangkat dan ruang yang memungkinkan kebersamaan rencana dan informasi.

Ruang kelas seperti apakah yang cocok sebagai lingkungan belajar bagi pembelajaran semacam itu? Di bawah ini disajikan ruang kelas pada abad ke-21 yang dirancang oleh *the American Architectural Foundation* (2005).

Ilustrasi 5: A 21<sup>ST</sup> CENTURY CLASSROOM DESIGN



Sumber: *the American Architectural Foundation* (2005).

Ruang kelas pada abad ke-21 mungkin tidak terlalu besar, tetapi menampung segala kebutuhan belajar bagi peserta didik. Sandrock (2008) mengatakan bahwa *the physical space of many 21st century learning environments may be small, the learning they engender extends out into the local community and the world at large* --ruang fisik pada lingkungan belajar abad ke-21 mungkin kecil, belajar yang dirasakan siswa berkembang ke luar komunitas lokal dan dunia pada umumnya. Menurut *the American Architectural Foundation* (2005) bahwa *one-way to do this is through innovative sharing of space with the schools' local community, such as making performance spaces and meeting rooms available to the public. Some communities are establishing school facilities and developing programs that bring students together in meaningful ways. Such an effort can include scheduling classes at different times (not just between the hours of 8 and 3)* ---salah satu cara untuk melakukan ini yaitu melalui kebersamaan ruangan yang inovatif dengan komunitas lokal sekolah, seperti membuat ruangan pertunjukkan dan ruang rapat yang berguna bagi publik. Beberapa komunitas mendirikan fasilitas sekolah dan mengembangkan program yang membawa siswa bersama-sama dalam cara yang bermanfaat. Usaha semacam itu dapat mencakup penjadwalan kelas pada waktu yang berbeda (tidak hanya antara jam 8 sampai dengan 15). Sack-Min (2007) menegaskan bahwa *schools must become community centers with hours that extend well beyond the current school day to provide access to technology resources, recreational activities, and health services. Such collaborative arrangements can offset costs for all stakeholders while creating year-round multi-generational learning places that enrich*

*relationships among community members* ---sekolah harus menjadi pusat komunitas dengan jam yang berkembang baik di luar hari sekolah saat ini untuk melengkapi akses ke sumber teknologi, kegiatan rekreasi, dan layanan kesehatan. Peniapan kerjasama seperti ini dapat menyeimbangkan biaya bagi seluruh pemangku kepentingan, sambil menciptakan tempat belajar tahunan multi-generasi yang memperkaya hubungan diantara anggota komunitas.

## **BAB III**

### **KAJIAN EMPIRIK KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERLAKU SAAT INI**

#### **A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Pengkajian secara empirik terhadap kurikulum yang berlaku saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan prinsipil, karena hasil pengkajian dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pengembangan kurikulum yang akan datang. Jelasnya bahwa perubahan terhadap sesuatu kurikulum harus dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu kondisi nyata yang ada sekarang ini, agar kurikulum yang datang bisa lebih baik lagi.

KTSP merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan di setiap tingkat satuan pendidikan. Apabila dikaji secara cermat, sebenarnya pengembangan kurikulum yang dimaksud tersebut tidaklah sepenuhnya dilakukan oleh sekolah sebab hal-hal yang terkait dengan kurikulum sudah tersedia di dalam Standar Isi. Dalam arti bahwa pengembangan KTSP hanya mengembangkan visi, misi, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran; sedangkan yang menyangkut kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik sudah tersedia di dalam Standar Isi.

Struktur kurikulum SMA yang berlaku saat ini sangat kaku (*rigid*), karena masih mengkotak-kotakkan peserta didik ke dalam penjurusan tradisional yang dipaksakan. Penjurusan merupakan bentuk program kekhususan yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Program kekhususan tersebut terdiri atas: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam – IPA; (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial – IPS; (3) Program Bahasa; dan (4) Program Keagamaan. Meskipun telah disediakan struktur kurikulum untuk Program Keagamaan, namun sejauh ini belum ada satu pun SMA yang membuka program ini.

Tingkatan kelas di SMA terdiri atas 3 kelas, yaitu Kelas X (sepuluh), Kelas XI (sebelas), dan Kelas XII (dua belas). Peserta didik pada Kelas X diwajibkan mempelajari mata pelajaran yang sama, karena penjurusan baru dimulai pada semester 1 Kelas XI. Hal itu tampak sebagaimana yang dirinci dalam struktur kurikulum berikut ini.

## 1. Struktur Kurikulum SMA di Kelas X.

Ilustrasi 6: Struktur Kurikulum SMA Kelas X

Komponen		Alokasi Waktu	
		Semester 1	Semester 2
A.	Mata Pelajaran		
	1. Pendidikan Agama	2	2
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
	3. Bahasa Indonesia	4	4
	4. Bahasa Inggris	4	4
	5. Matematika	4	4
	6. Fisika	2	2
	7. Biologi	2	2
	8. Kimia	2	2
	9. Sejarah	1	1
	10. Geografi	1	1
	11. Ekonomi	2	2
	12. Sosiologi	2	2
	13. Seni Budaya	2	2
	14. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2
	15. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
	16. Keterampilan Bahasa Asing	2	2
B.	Muatan Lokal	2	2
C.	Pengembangan Diri	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>
Jumlah		38	38

2<sup>\*)</sup> Ekuivalen 2 jam pembelajaran.

Pada umumnya, penjurusan mulai dilakukan setelah peserta didik naik ke Kelas XI. Namun demikian, ada beberapa SMA tertentu mulai melakukan penjurusan pada semester 2 Kelas X.

## 2. Struktur Kurikulum SMA di Kelas XI dan XII.

### a. Program IPA

Ilustrasi 7: Struktur kurikulum SMA Kelas XI dan XII: Program IPA

Komponen		Alokasi Waktu	
		Kelas XI	Kelas XII
A.	Mata Pelajaran		
	1. Pendidikan Agama	2	2
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
	3. Bahasa Indonesia	4	4
	4. Bahasa Inggris	4	4
	5. Matematika	4	4
	6. Fisika	4	4
	7. Biologi	4	4
	8. Kimia	4	4
	9. Sejarah	1	1
	10. Seni Budaya	2	2
	11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2
	12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
	13. Keterampilan Bahasa Asing	2	2
B.	Muatan Lokal	2	2
C.	Pengembangan Diri	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>
Jumlah		39	39

2<sup>\*)</sup> Ekuivalen 2 jam pembelajaran.

### b. Program IPS

Ilustrasi 8: Struktur kurikulum SMA Kelas XI dan XII: Program IPS

Komponen		Alokasi Waktu	
		Semester 1	Semester 2
A.	Mata Pelajaran		
	1. Pendidikan Agama	2	2
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
	3. Bahasa Indonesia	4	4
	4. Bahasa Inggris	4	4

Komponen		Alokasi Waktu	
		Semester 1	Semester 2
	5. Matematika	4	4
	6. Sejarah	3	3
	7. Geografi	3	3
	8. Ekonomi	4	4
	9. Sosiologi	3	3
	10. Seni Budaya	2	2
	11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2
	12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
	13. Keterampilan Bahasa Asing	2	2
B.	Muatan Lokal	2	2
C.	Pengembangan Diri	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>
Jumlah		39	39

2<sup>\*)</sup> Ekuivalen 2 jam pembelajaran.

#### a. Program Bahasa

Ilustrasi 9: Struktur kurikulum SMA Kelas XI dan XII: Program Bahasa

Komponen		Alokasi Waktu	
		Semester 1	Semester 2
A.	Mata Pelajaran		
	1. Pendidikan Agama	2	2
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
	3. Bahasa Indonesia	5	5
	4. Bahasa Inggris	5	5
	5. Matematika	3	3
	6. Sastra Indonesia	4	4
	7. Bahasa Asing	4	4
	8. Antropologi	2	2
	9. Sejarah	2	2
	10. Seni Budaya	2	2
	11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2
	12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
	13. Keterampilan Bahasa Asing	2	2



Komponen		Alokasi Waktu	
		Semester 1	Semester 2
B.	Muatan Lokal	2	2
C.	Pengembangan Diri	2 <sup>*)</sup>	2 <sup>*)</sup>
Jumlah		39	39

2<sup>\*)</sup> Ekuivalen 2 jam pembelajaran.

Ketidakmampuan untuk mengubah pola pendidikan di SMA telah diperkokoh dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 79 Ayat (2), yang menetapkan bahwa penjurusan di SMA terdiri atas:

- a. program studi ilmu pengetahuan alam;
- b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
- c. program studi bahasa;
- d. program studi keagamaan; dan
- e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.

Penjurusan ini membuat peserta didik terperangkap ke dalam pengkotakkan dan kondisi yang tidak bisa dihindarinya. Padahal, sebenarnya penjurusan belum waktunya dilakukan pada tingkat SMA. Selain itu, penjurusan di SMA menjadi tidak bermakna sama sekaliketika perguruan tinggi membuka kesempatan bagi seluruh lulusan SMA dari jurusan apapun untuk memilih program studi di perguruan tinggi. Jadisebenarnya penjurusan di SMA tidak diperlukan, karena perguruan tinggi hanya akan memilih lulusan SMA yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan inkuiri.

## B. Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan yang dilakukan pada satuan pendidikan SMA pada saat ini yaitu sebahai berikut:

- a. Kelas Reguler diberikan untuk melayani peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam kategori rata-rata, menggunakan kurikulum lokal dan nasional, dengan masa belajar 3 tahun;
- b. Kelas Khusus/Plus diberikan untuk melayani peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam kategori di rata-rata, menggunakan kurikulum lokal dan nasional yang dimodifikasi sedemikian rupa, dengan masa belajar 3 tahun;
- c. Kelas Cerdas Istimewa diberikan untuk melayani peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam kategori di atas rata-rata dengan, menggunakan kurikulum yang lokal, nasional dan internasional serta proses pembelajarannya dengan sistem *bilingual*, dengan masa belajar 2 tahun;
- d. Kelas *Bilingual* diberikan untuk melayani peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam kategori di atas rata-rata, menggunakan

kurikulum lokal, nasional, dan internasional yang dimodifikasi sedemikian rupa, dengan bahasa Inggris sebagai pengantar di samping bahasa Indonesia sendiri, dengan masa belajar 3 tahun.

- e. Kelas Bertaraf Internasional diberikan untuk melayani peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam kategori di atas rata-rata, dengan kurikulum selain mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan tetapi juga kepada standar pendidikan negara-negara maju. Proses pembelajarannya menggunakan sistem *bilingual*.

### **C. Sistem Pembelajaran**

Sistem pembelajaran di pada umumnya masih didominasi oleh penerapan metodologi pembelajaran yang mengarah pada pengalihan pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan yang hanya demi kelulusan ujian (*teaching to the test*). Pengalihan pengetahuan ditandai dengan pembelajaran yang berorientasi pada materi pelajaran dengan penggunaan metode ceramah. Pembelajaran yang hanya demi kelulusan ujian ditandai dengan pembahasan soal-soal ujian untuk menghadapi tes penguasaan materi pelajaran dalam bentuk serangkaian ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, dan ujian nasional.

Ketika pembelajaran didominasi dengan pengalihan pengetahuan dan demi kelulusan ujian, pembelajaran tidak akan pernah menggunakan metode secara variatif. Oleh karena itu, pembelajaran semacam itu hanya akan mengakibatkan menurunnya olah-pikir, olah-rasa, olah-laku, dan olah-karsa peserta didik. Mereka hanya menjadi objek penghafal seluruh materi yang akan diujikan, apalagi ditambah dengan pola mencatat yang seringkali menjadi andalan agar alokasi waktu pembelajaran bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tidaklah salah apabila mereka merasa jenuh menghadapi pembelajaran semacam itu.

Kritikan masyarakat terhadap lulusan dari pendidikan SMA yang tidak mempunyai kemampuan yang memadai selain hanya menjadi manusia penghafal saja telah membuktikan bahwa pembelajaran tidak memberdayakan potensi mereka. Kemampuan memecahkan masalah, melakukan inkuiri, dan berpikir kritis dan logis jauh dari impian, karena pembelajaran tidak mengarahkan mereka pada kemampuan tersebut. Inilah pokok pangkal peserta didik SMA yang selalu ketinggalan oleh peserta didik di negara-negara yang selalu mengaplikasikan kemampuan memecahkan masalah, melakukan inkuiri, dan berpikir kritis dan logis

### **D. Sistem Penilaian**

Penilaian pendidikan yang berlaku sekarang ini pada satuan pendidikan SMA terdiri atas sebagai berikut:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan melalui: pengamatan, ulangan dan penugasan;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui Ujian Sekolah merupakan salah satu syarat kelulusan dari satuan pendidikan;
- c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional merupakan salah satu syarat kelulusan dari satuan pendidikan.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian sebagaimana yang dimaksud digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

- a. **Ulangan Harian** dilakukan setelah peserta didik selesai dari satu Kompetensi Dasar atau lebih. Ulangan Harian tersebut dilakukan melalui: tertulis, observasi, penugasan, atau lainnya.
- b. **Ulangan Tengah Semester** dilakukan setelah peserta didik selesai dari beberapa Kompetensi Dasar (8 – 9 minggu pembelajaran). Ulangan Tengah Semester tersebut dilakukan melalui: tes tertulis atau penugasan.
- c. **Ulangan Akhir Semester** dilakukan setelah peserta didik selesai dari semua Kompetensi Dasar pada semester yang bersangkutan. Ulangan Akhir semester tersebut dilakukan melalui: tes tertulis atau penugasan
- d. **Ulangan Kenaikan Kelas** dilakukan setelah peserta didik selesai dari semua Kompetensi Dasar pada akhir semester genap. Ulangan Kenaikan Kelas tersebut dilakukan melalui tes tertulis atau penugasan dengan kriteria berikut ini.

1) Kriteria Umum:

Kehadiran peserta didik di luar sakit *minimal* 95%;

2) Kriteria Khusus:

- a) Tidak ada nilai 40 (empat puluh) atau kurang dari 40 (empat puluh) untuk semua mata pelajaran;
- b) Nilai murni rata-rata untuk semua mata pelajaran termasuk psikomotorik sekurang-kurangnya sesuai dengan target Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah;
- c) Hanya boleh ada 3 (tiga) nilai kurang (NK), dengan ketentuan sesuai dengan KKM yang berlaku di masing-masing kelas/program.
- d) Nilai sikap dan kepribadian minimal BAIK (B).

Penetapan kenaikan kelas dihitung dari nilai semester 1 dan 2 dengan ketentuan: (1) menghitung rata-rata nilai semester 1 dan 2 pada mata pelajaran tersebut; (2) menghitung rata-rata KKM semester 1 dan 2 mata pelajaran tersebut; dan (3) Jika nilai semester 1 dan 2 mata pelajaran tersebut sama atau lebih besar dari rata-rata KKM, mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas.

e. **Ujian Sekolah**

Ujian Sekolah/Madrasah adalah ujian akhir bagi peserta didik kelas XII dengan materi ujian yang tidak diujikan. Kriteria kelulusan Ujian Sekolah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nilai Ujian Sekolah adalah gabungan 0,60 nilai Ujian Sekolah dan 0,40 rata-rata nilai rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5.

f. **Ujian Nasional**

Pengertian Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar peserta didik Kelas XII oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan

secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Hasil Ujian Nasional semestinya dapat digunakan untuk kepentingan dan pertimbangan sebagai: (1) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan (4) dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

## **BAB IV**

# **KAJIAN EMPIRIK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERLAKU SAAT INI**

### **A. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Pasal 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.
- (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Mengacu pada Lampiran peraturan tersebut dinyatakan standar kompetensi satuan pendidikan SMA dikembangkan berdasarkan pada tujuan pendidikan SMA, yakni: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar Kompetensi Lulusan SMA selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja
2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya
3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya
4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial
5. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global
6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan
8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri
9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik
10. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks

11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial
12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya
15. Mengapresiasi karya seni dan budaya
16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok
17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan
18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun
19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain
21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis
22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris
23. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi

Berdasarkan pada kompetensi lulusan satuan pendidikan tersebut selanjutnya dirumuskan masing-masing kompetensi lulusan mata pelajaran sebagaimana mata pelajaran yang dialokasikan dalam struktur kurikulum SMA.

## **B. Standar isi**

Standar Isi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Pasal 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Di dalam Lampiran peraturan tersebut, dokumen Standar Isi secara keseluruhan pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
2. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan

4. kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

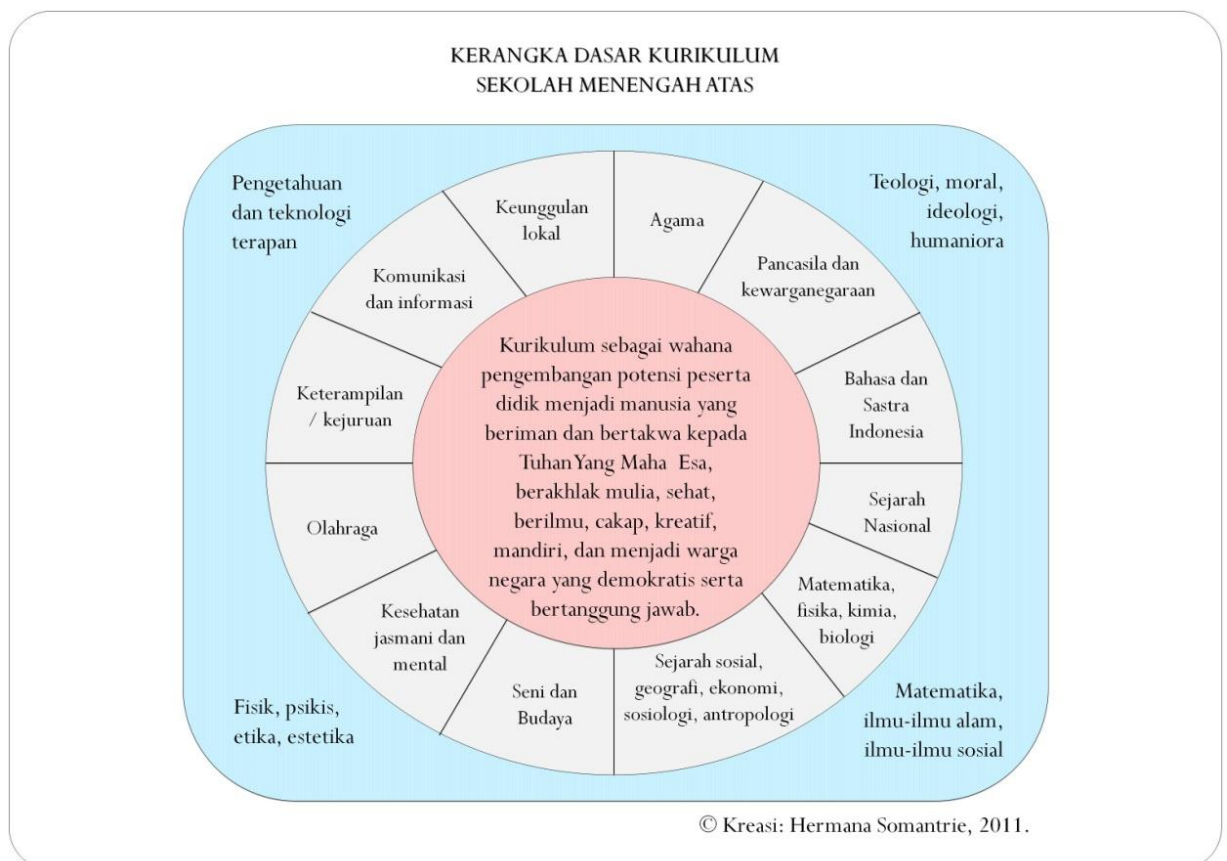
Selain itu, Standar Isi mempunyai Lampiran kompetensi seluruh mata pelajaran sebagaimana yang dialokasikan dalam Struktur Kurikulum SMA. Kompetensi mata pelajaran yang dibagi ke dalam semester 1 sampai dengan 6 memuat dua unsur utama, yaitu Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

# BAB V

## RANCANGAN BARU KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS DI MASA YANG AKAN DATANG

### A. Kerangka Dasar Kurikulum

Kerangka dasar Kurikulum SMA merupakan komponen fundamental kurikulum yang mendeskripsikan filosofikurikulum bagi satuan pendidikan yang bersangkutan sebagaimana yang diamanatkan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Atas dasar itu, kerangka dasar Kurikulum SMA dirumuskan sebagai berikut:



Melalui kerangka dasar Kurikulum SMA tersebut, kurikulum akan menjadi wahana bagi peserta didik SMA dalam membangun karakter dan kompetensinya sebagai berikut:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

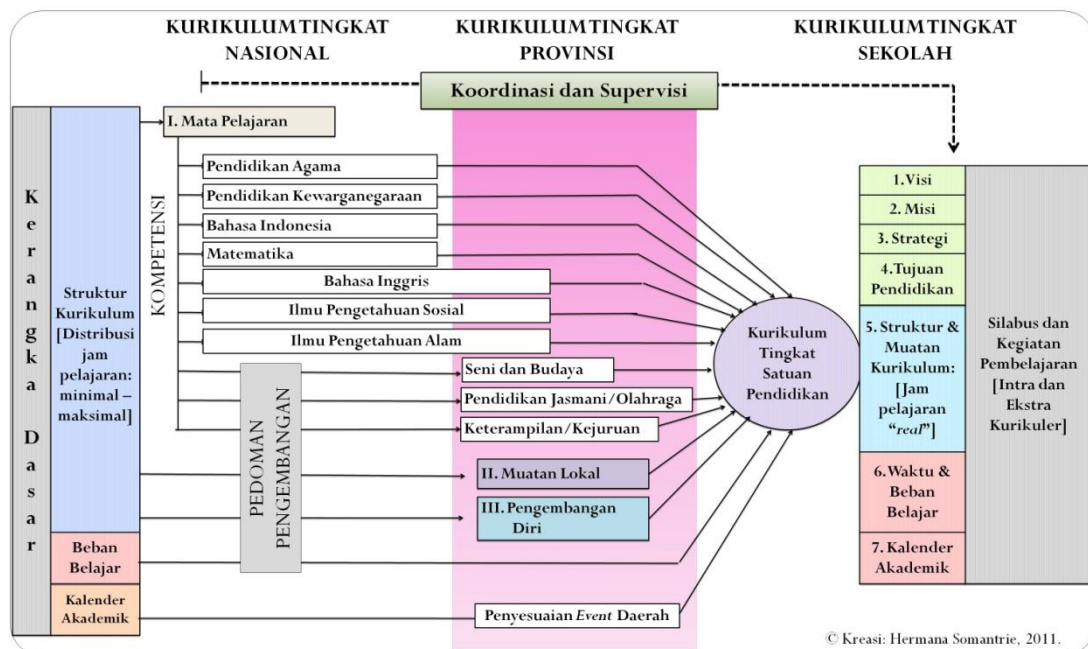


- c. mempelajari dan menguasai berbagai konsep ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

## B. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum SMA di masa depan perlu dibuat secara terbuka sesuai dengan makna pendidikan yang bersifat umum. Perwujudan kemampuan, bakat, dan minat tidak dipaksakan dengan pengkotakkan ala penjurusan atau program studi, namun lebih cenderung pada penyiapan bahan pelajaran yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selain itu juga mempertimbangkan kebutuhan daerah untuk secara proaktif membangun kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengangkat potensi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, struktur kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan pemilihan alternatif model yang dimuat dalam Naskah Akademik Penataan Ulang Kurikulum sebagai berikut.



Perumusan secara detail rancangan struktur kurikulum SMA masa depan adalah sebagaimana yang dimuat dalam tabel berikut ini.

Ilustrasi 10: Rancangan Struktur Kurikulum SMA Masa Depan

KOMPONEN		RATIO	
I.	<b>NASIONAL (PUSAT): 80%</b>		
	<b>A.</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan:</b>	<b>25%</b>
		1. Agama	
		2. Pancasila dan Kewarganegaraan	
		3. Bahasa Indonesia	
	<b>B.</b>	<b>Pengembangan Ilmu dan Teknologi:</b>	<b>55%</b>
		Prasyarat	
		1. Matematika I, II, III *)	
		2. Bahasa Inggris I, II, III **)	
		3. Tehnologi Informasi dan Komunikasi	
		Kemampuan, Bakat, dan Minat Ilmu Alam ***)	
		4. Fisika	
		5. Biologi	
		6. Kimia	
		Kemampuan, Bakat, dan Minat Ilmu Sosial ****)	
		7. Sejarah Sosial	
8. Geografi			
9. Ekonomi			
10. Sosiologi			
11. Antropologi Sosial			
Kemampuan, Bakat, dan Minat Bahasa *****)			
12. Bahasa dan Sastra Indonesia			
13. Bahasa dan Sastra Inggris			
14. Bahasa dan Sastra Asing lainnya			
15. Antropologi Budaya			
II.	<b>DAERAH (PROVINSI): 20%</b>		
	<b>C.</b>	<b>Pengembangan Potensi:</b>	<b>20%</b>
		1. Seni dan Budaya	
		2. Olahraga/Kesehatan Jasmani dan Mental	
3. Keterampilan			

		4. Keunggulan lokal	
		5. Pengembangan Diri	

Keterangan:

- \*) Matematika I, II, III wajib Ilmu Alam  
Matematika I dan II wajib Ilmu Sosial dan Bahasa
- \*\*\*) Bahasa I dan II wajib Ilmu Alam dan Ilmu Sosial  
Matematika I, II, III wajib Bahasa
- \*\*\*\*) Kemampuan, Bakat, dan Minat Ilmu Alam diwajibkan memilih mata pelajaran tambahan lintas area.
- \*\*\*\*\*) Kemampuan, Bakat, dan Minat Ilmu Sosial diwajibkan memilih mata pelajaran tambahan lintas area.
- \*\*\*\*\*) Kemampuan, Bakat, dan Minat Bahasa diwajibkan memilih mata pelajaran tambahan lintas area.

Penentuan mata pelajaran sesuai kemampuan, bakat, dan minat bisa dimulai di kelas X dengan mempertimbangkan:

1. Nilai raport dan hasil UN SMP
2. Kemampuan, bakat, dan minat siswa
3. Hasil test Potensi Akademik (TPA)
4. Rekomendasi Wali Kelas/Wali Murid

Rancangan kurikulum ini lebih menegaskan pentingnya: (1) pengembangan wawasan kebangsaan yang harus dipelajari oleh seluruh peserta didik; (2) pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik yang terbuka untuk memilih mata pelajaran; dan (3) pengembangan potensi sebagai upaya keterlibatan provinsi guna melakukan penjaminan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing.

## C. Beban Belajar Dengan Sistem Kredit Semester

### 1. Komponen Beban Belajar

Beban belajar di SMA diatur dengan menggunakan Sistem Kredit Semester yang dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada satuan pendidikan SMA ditetapkan selama 45 menit.

Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka Keseluruhan untuk Satuan Pendidikan SMA sebagai berikut:

Kelas	Satu jam pembelajaran tatap muka (menit)	Jumlah jam pembelajaran per minggu	Minggu efektif per tahun ajaran	Waktu pembelajaran per tahun	Jumlah jam per tahun (a 60 menit)
X - XI - XII	45	40	34 s.d. 38	$38 \times 40 \times 45 = 68.400$ menit per tahun	1140 jam

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian kegiatan mandiri diatur sendiri oleh peserta didik.

## 2. Konsep SKS

Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Atas dasar rumusan konsep SKS tersebut, dalam naskah akademik ini “**Sistem Kredit Semester**” disingkat dengan “**SKS**” dan “**satuan kredit semester**” disingkat dengan “**sks**”.

## 3. Prinsip

Mengacu pada konsep SKS, penyelenggaraan SKS di SMA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
- Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
- Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.

- e. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.
- f. Peserta didik dapat pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.
- g. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
- h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- i. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

#### 4. Penghitungan Beban Belajar

Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMA yaitu memadukan semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk SKS, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3: Penghitungan Beban Belajar sks di SMA  
Berdasarkan pada Sistem Paket

Kegiatan	Sistem Paket	Sistem SKS
Tatap muka	45 menit	45 menit
Penugasan terstruktur	60% x 45 menit =	45 menit
Kegiatan mandiri	27 menit	45 menit
Jumlah	72 menit	135 menit

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 sks yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$1 \text{ sks} = \frac{135}{72} = 1.88 \text{ jam pembelajaran}$$

Dengan demikian, beban belajar sks untuk SMA dengan mengacu pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban belajar 1 sks pada SKS sama dengan beban belajar 1.88 jam pembelajaran pada Sistem Paket. Agar lebih jelas lagi, dalam Tabel 4 disajikan contoh konversi kedua jenis beban pembelajaran tersebut.

Tabel 4: Contoh Konversi Beban Belajar di SMA/MA

Sistem Paket	SKS
1.88 jam pembelajaran	1 sks
3.76 jam pembelajaran	2 sks
5.64 jam pembelajaran	3 sks
7.52 jam pembelajaran	4 sks

Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA yaitu **minimal 114 sks** dan **maksimal 126 sks** selama periode belajar 6 semester.

### 5. Penetapan Beban Belajar

Pengambilan beban belajar dalam setiap semester oleh peserta didik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan beban belajar pada setiap semester.
- b. Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh Pembimbing Akademik (*Academic Adviser*).
- c. Kriteria yang digunakan untuk menentukan beban belajar bagi peserta didik yaitu:
  - 1) semester 1 mengambil mata pelajaran sesuai dengan Standar Isi;
  - 2) semester berikutnya mempertimbangkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- d. Peserta didik wajib menyelesaikan semua mata pelajaran yang tertuang dalam Standar Isi.
- c. Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran secara tuntas dengan prinsip *"on and off"*, yaitu suatu mata pelajaran bisa diberikan hanya pada semester tertentu dengan mempertimbangkan ketuntasan kompetensi pada setiap semester.

### 6. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Pengaturan mengenai penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### a. Penilaian

Penilaian setiap mata pelajaran menggunakan skala 0 - 10 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

#### b. Penentuan Indeks Prestasi

- 1) Semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang sama pada semester 1 sesuai dengan Standar Isi.
- 2) IP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum N \times sks}{Jumlah\ sks}$$

Keterangan:

IP: Indeks Prestasi

$\Sigma N$ : Jumlah mata pelajaran

sks: satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks: jumlah sks dalam satu semester

- 3) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IP < 5.0 dapat mengambil maksimal 10 sks.

a) IP 5.0 – 5.9 dapat mengambil maksimal 14 sks.

b) IP 6.0 – 6.9 dapat mengambil maksimal 20 sks.

c) IP 7.0 – 8.5 dapat mengambil maksimal 28 sks.

d) IP > 8.5 dapat mengambil maksimal 36 sks.

- 4) Penjurusan dapat dilaksanakan mulai semester pertama tahun pertama.

### c. Penentuan Indeks Prestasi

Kelulusan peserta didik mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- a. Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk mengulang mata pelajaran yang gagal.
- b. Peserta didik SMA/MA dinyatakan lulus pada mata pelajaran utama dalam program studi apabila telah mencapai KKM 7.0. Sedang untuk mata pelajaran lain diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan KKM minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.
- c. Peserta didik SMP/MTs dinyatakan lulus pada mata pelajaran apabila telah mencapai KKM 7.0. Satuan pendidikan dapat menetapkan KKM di bawah 7.0, minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.
- d. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester.
- e. Kelulusan peserta didik dinyatakan setelah:
  - 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - 2) memperoleh nilai minimal **baik** pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganewaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;

- 3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 4) lulus Ujian Nasional.

## **7. Implikasi**

Implikasi dari kurikulum yang mengakomodasi kemampuan, bakat, dan minat melalui Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut:

### **a. Penyelenggaraan Ujian Nasional**

Mengingat kemungkinan adanya peserta didik SMA yang menyelesaikan pendidikan sebelum batas waktu yang ditetapkan perlu agar Ujian Nasional diselenggarakan 2 kali dalam satu tahun pada setiap akhir semester.

### **b. Ujian Masuk Perguruan Tinggi**

- 1) Mengingat kemungkinan adanya peserta didik SMA yang menyelesaikan pendidikan sebelum batas waktu yang ditetapkan perlu agar Ujian Masuk Perguruan Tinggi diselenggarakan 2 kali dalam satu tahun.
- 2) Perguruan tinggi tidak perlu melakukan ujian masuk yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok seperti sekarang ini, yaitu: (1) Kelompok Ujian IPA; (2) Kelompok Ujian IPS; dan (3) Kelompok Ujian IPC (campuran IPA dan IPS), karena pada kenyataannya yang lainnya bahwa setiap peserta diperbolehkan juga untuk mengikuti kelompok Ujian IPA, IPS atau IPC tidak harus sesuai dengan jurusan SMA/MA/SMK/MAK yang bersangkutan. Ujian masuk perguruan tinggi sebaiknya dirancang dengan pendekatan tes yang menguji kemampuan dan keterampilan berpikir serta prediksi keberhasilan belajar di perguruan tinggi.

Dengan adanya kurikulum SMA yang terbuka akan memberikan ruang kompetisi yang juga terbuka bagi lulusannya untuk bersaing dalam memilih program studi di suatu perguruan tinggi yang diinginkannya, baik negeri maupun swasta, tanpa diskriminatif.

## **D. Sistem Pembelajaran**

Sistem pembelajaran di SMA mengacu pada ketentuan Pasal 12 Ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: "Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan".

Atas dasar hal itu, sistem pembelajaran di SMA harus memberikan kemungkinan kepada peserta didik untuk:

- a. menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- b. mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
- c. didorong dalam memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
- d. menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.



- e. memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.
- f. pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.

Agar sistem pembelajaran tersebut dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien perlu diadakan dukungan sebagai berikut:

- a. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
- b. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- c. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

## **E. Sistem Penilaian**

Perubahan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA yaitu dengan menerapkan pendekatan penilaian kelas (*classroom assessment*). Pengertian yang dikemukakan Stassen, Doherty, dan Poe (2008) tentang penilaian kelas adalah *the systematic collection and analysis of information to improve student learning* ---koleksi dan analisis sistematis informasi untuk memperbaiki belajar siswa. Pengertian ini mengandung makna bahwa penilaian yang dilakukan guru setiap saat di kelas diarahkan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik. Perbaikan hasil belajar tersebut diarah agar peserta didik memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dianggap mencapai standar yang ditetapkan.

Pendekatan ini menghendaki adanya perubahan dalam cara pandang pendidikan dan belajar serta penilaian guru terhadap pencapaian hasil belajar. Dengan cara pandang ini informasi mengenai tingkat penguasaan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik yang diperoleh dari ulangan, tugas, dan alat lain tidak digunakan untuk memberikan sanksi kepada peserta didik. Peserta didik tidak dianggap sebagai objek yang sedang berpacu dan guru menjadi wasit dalam menentukan keberhasilan setiap peserta pacuan. Dengan pendekatan penilaian kelas, peserta didik dianggap sebagai subjek dalam pendidikan dan pembelajaran adalah proses membantu peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan kemampuan yang dinyatakan dalam tujuan.

Melalui penilaian kelas maka proses belajar bukan lagi tempat dimana peserta didik bekerja dengan kemampuan mereka sendiri dan kemudian dinilai keberhasilan. Dalam Penilaian kelas, proses belajar diposisikan sebagai kesempatan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan dengan bantuan guru dan bahkan teman sekelas. Keberhasilan pendidikan dinilai apabila seluruh peserta didik memiliki pengetahuan dan kemampuan minimal yang dipersyaratkan, dalam konteks penilaian kelas pengetahuan dan kemampuan minimal tersebut dinyatakan dalam tujuan khusus pembelajaran.

Perbedaan yang terjadi antar peserta didik bukan antara mereka yang menguasai dan tidak menguasai sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang. Perbedaan yang

terjadi, pendekatan penilaian kelas tidak menolak adanya perbedaan tersebut, adalah antara peserta didik yang memiliki penguasaan minimal yang dipersyaratkan dan mereka yang memiliki penguasaan di atas yang dipersyaratkan. Oleh karena itu pendekatan penilaian kelas sangat sesuai dengan pandangan dan kebijakan modern pendidikan, bahwa setiap anak bangsa dapat memiliki kemampuan yang dinyatakan dalam standar kelulusan peserta didik.

Stassen, Doherty, dan Poe (2008) mengemukakan mengapa penilaian kelas perlu diterapkan sebagai berikut:

- *To find the extend to which anticipated outcomes actually occur and determine to what degree learning takes place* ---menemukan tingkat hasil yang diantisipasi sebenarnya terjadi dan menentukan seberapa tingkat terjadinya belajar;
- *Makes the learning process more effective* ---membuat proses belajar lebih efektif;
- *Help instructors become better teacher* ---membantu pengajar menjadi pendidik yang baik;
- *Provides systematic feedback to students* ---melengkapi umpan balik sistematis kepada siswa.

Alasan tersebut menyebabkan pendekatan penilaian kelas menjadi pendekatan yang memberikan pencerahan dalam dunia pendidikan, masyarakat, dan bangsa. Penilaian adalah proses sistematis dan sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Penilaian Berbasis Kelas (PBK) adalah penilaian yang dilakukan oleh guru selama berlangsung dan sesudah berlangsung suatu program untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi program pembelajaran di kelas.

Tujuan Penilaian Berbasis Kelas (PBK) diarahkan untuk:

1. *Keeping Track* (Proses pembelajaran sesuai dengan rencana)
2. *Checking Up* (Mengecek kelemahan dalam proses pembelajaran)
3. *Finding Out* (Menemukan kelemahan dan kesalahan dalam pembelajaran), dan
4. *Summing Up* (Menyimpulkan pencapaian kompetensi peserta didik).

## **F. Kalender Akademik**

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

### **1. Alokasi Waktu**

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada tabel berikut:

### **Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan**

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1.	Minggu efektif belajar	Minimum 36 minggu dan maksimum 40 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Jeda tengah semester	Maksimum 1 minggu	Satu minggu setiap semester
3.	Jeda antarsemester	Maksimum 1 minggu	Antara semester I dan II
4.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 2 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
5.	Hari libur keagamaan	2 – 3 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
6.	Hari libur umum/nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
7.	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
8.	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

Catatan: 1 minggu = 6 hari kerja

### **2. Penetapan Kalender Pendidikan**

1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan.

3. Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
4. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
5. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

## **G. Pengelolaan Kurikulum**

Konsep pengelolaan kurikulum adalah pengaturan kewenangan berkenaan dengan kurikulum oleh penyelenggara pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengaturan kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan bagi Pemerintah dalam pengelolaan kurikulum yaitu mengembangkan dan menetapkan secara nasional kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik. Selain itu, Pemerintah membuat panduan bagi: (1) pemerintah provinsi dalam pengembangan kurikulum di tingkat provinsi dan sekolah, dan (2) bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah.
2. Pengaturan kewenangan bagi pemerintah provinsi yaitu mengembangkan mata pelajaran yang diatur dalam kurikulum nasional menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
3. Pengaturan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sekolah secara operasional di wilayah yang bersangkutan.
4. Pengaturan kewenangan di tingkat satuan pendidikan yaitu mengembangkan dan melaksanakan kurikulum sekolah secara operasional agar proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan potensi peserta didik secara holistik.

## **BAB VI**

# **RANCANGAN BARU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS**

### **A. Rancangan Baru Standar Kompetensi Lulusan**

Rancangan baru SKL SMA yaitu SKL yang memuat sejumlah rumusan umum penguasaan kompetensi secara utuh yang ditunjukkan peserta didik setelah menyelesaikan masa belajar pada suatu satuan pendidikan tertentu. Inilah yang dinamakan dengan SKL Satuan Pendidikan. Kompetensi mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi SKL SMA pada hakikatnya menggambarkan kualitas minimal pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja tertentu yang harus dimiliki setiap peserta didik ketika mereka menyelesaikan pendidikan di SMA.

Pengetahuan adalah dasar untuk pengembangan keterampilan dan proses internalisasi nilai/moral/sikap. Pada gilirannya, keterampilan diperlukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan baik ketika peserta didik melakukan aktivitas belajar di sekolah mau pun ketika sudah tidak lagi berstatus sebagai peserta didik. Keterampilan hanya dapat digunakan apabila ada dorongan nilai/moral/sikap. Seseorang baru akan belajar (belajar sepanjang hayat) ketika ia memiliki rasa ingin tahu, ketabahan dalam menghadapi berbagai kesulitan belajar, menghargai prestasi, dan senang membaca.

Dengan demikian, rumusan SKL SMA mencakup pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik, kemampuan kognitif atau berpikir (memroses informasi), kemampuan afektif yang mencapai tingkat tertinggi berupa kebiasaan yang menjadi jati diri seseorang, dan kemampuan melakukan sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan nilai/moral/sikap yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas, SKL SMA dirumuskan agar siswa SMA memiliki kemampuan lanjutan dalam bidang-bidang berikut ini.

1. Pengembangan nilai-nilai agama dan akhlak mulia:
  - melaksanakan dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
  - menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan status sosial ekonomi.
  - memiliki karakter: beriman dan bertaqwa, jujur, bertanggung jawab, sopan santun dan tata krama, peduli, toleran, kasih sayang, percaya diri, dan adil.
  - berpartisipasi aktif dalam penegakan nilai dan norma sosial-kemasyarakatan.
2. Pengembangan nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan kepribadian:
  - memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
  - mencintai dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan UUD 1945.

- memahami, menghayati dan melaksanakan kewajiban dan hak diri sendiri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- mengembangkan diri secara optimal dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada.
- mampu bekerja sama secara harmonis dengan berbagai pihak.

### 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:

- menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
- mengambil keputusan secara cepat, cekat, tepat, dan rasional.
- menerapkan dan mengembangkan budaya belajar.
- menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam kehidupan berkenaan dengan gejala alam, sosial, dan kehidupan sehari-hari.
- memanfaatkan dan mengembangkan lingkungan dan sumber daya alam secara efisien, produktif dan bertanggung jawab.
- bersikap ingin tahu dan mempelajari untuk menemukan sesuatu yang baru tentang berbagai gejala dalam kehidupan dan kondisi lingkungan.
- menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peduli terhadap kondisi masyarakat.
- berwawasan global dan memahami hubungan antarbangsa.
- mampu mengkritisi, mengungkapkan dan memaparkan pendapat dalam berbagai kegiatan.
- terampil dalam menyimak, membaca dan menulis secara sistematis.
- berkomunikasi lisan, tulisan dan isyarat secara efektif dan santun dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua.

### 4. Pengembangan nilai-nilai estetika:

- mengapresiasi karya seni dan budaya.
- menghasilkan karya kreatif baik secara individual maupun kelompok.
- mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.

### 5. Pengembangan nilai-nilai olahraga dan kesehatan jasmani dan mental:

- bersikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- terampil dalam kegiatan olahraga
- menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani serta keamanan diri.
- menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

## **B. Rancangan Baru Standar Isi**

Rancangan baru SI SMA yaitu SI yang memuat sejumlah “*strand (element, component, aspect, feature)*” dan berasal dari suatu disiplin keilmuan dari suatu mata pelajaran dalam kurikulum satuan pendidikan tertentu. *Strand* dalam konteks pendidikan di Indonesia dapat juga disebut dengan Substansi Utama atau Konsep Esensial.

“*Strand*” yang disusun secara *logical sequence* atau rangkain logis menjadi dasar dalam penetapan ruang lingkup kompetensi yang bersifat umum dan materi pelajaran yang dapat dipetakan secara kontinum mulai dari PAUD, Kelas I sampai dengan XII. Selanjutnya kompetensi yang bersifat umum tersebut dalam kurikulum akan dijabarkan ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

## **BAB VII**

### **PENGUATAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERLAKU SAAT INI**

#### **A. Penerapan Metodologi Pembelajaran Yang Mengaktifkan**

Penerapan metodologi pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik menjadi salah satu tuntutan yang harus dilakukan dalam rangka penguatan kurikulum yang berlaku sekarang ini. Penerapan metodologi ini untuk menjawab kritikan masyarakat luas yang mensinyalir bahwa pembelajaran yang berlangsung di sekolah hanya mengejar kelulusan ujian (*teaching to the test*), sehingga pembelajaran tidak lagi memperhatikan atau mengabaikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap tanah air dan budaya-bahasa Indonesia.

Dalam proses pembelajaran yang berkualitas diperlukan guru yang mampu memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Proses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran dilakukan melalui tahapan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

#### **B. Pengintegrasian Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa**

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa merupakan upaya menyempurnakan pendidikan dan kurikulum ke arah yang telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Melalui upaya ini maka kurikulum diharapkan mampu menyediakan pengalaman belajar yang dapat mengembangkan berbagai kualitas yang perlu dimiliki peserta didik untuk dapat berperan sebagai warganegara yang aktif, kreatif, produktif, dan bertanggungjawab. Nilai-nilai seperti religius, jujur, kerjakeras, ulet (*perseverance*), menghargai prestasi, cinta tanah air dan sebagainya merupakan kualitas yang diamanatkan tujuan pendidikan nasional untuk dimiliki setiap warganegara. Nilai yang dimiliki peserta didik adalah motor yang menggerakkan kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk terus menerus mengembangkan diri.

Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,



berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Rumusan tujuan pendidikan nasional jelas menunjukkan bahwa pendidikan nilai merupakan realisasi dari tujuan pendidikan nasional. Melalui pemilikan nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa, generasi muda Indonesia diarahkan untuk menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab.

Dalam dokumen Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Balitbang, 2010) “pendidikan budaya dan karakter bangsa diartikan sebagai proses internalisasi serta penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dilakukan peserta didik secara aktif dibawah bimbingan guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan serta diwujudkan dalam kehidupannya di kelas, sekolah, dan masyarakat”. Rumusan tersebut mengandung makna nilai-nilai tersebut dikembangkan dalam suatu proses internalisasi yang dilakukan secara aktif oleh peserta didik sehingga menjadi milik mereka, bukan diajarkan sebagaimana ketika peserta didik belajar tentang suatu teori, peristiwa sejarah, prosedur, hukum, atau bahkan fakta.

Proses internalisasi adalah proses pemilikan nilai/moral/sikap yang terjadi di bawah bimbingan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan terintegrasi melalui proses belajar pengetahuan. Penghayatan mengandung makna bahwa nilai/moral/sikap yang sudah dimiliki melalui proses internalisasi dikembangkan dan dimantapkan peserta didik menjadi kebiasaan ketika mereka belajar sesuatu, berkomunikasi, dan dalam tindakan sehari-hari di kelas, sekolah, dan masyarakat. Proses internalisasi terjadi dalam kegiatan belajar sehari-hari melalui kegiatan-kegiatan berikut:

### **1. Kegiatan Belajar**

Dalam setiap pertemuan kelas ketika terjadi proses pembelajaran dan aktivitas peserta didik dalam dan antar mata pelajaran. Pada waktu peserta didik mengkaji suatu pokok bahasan, guru memberikan upaya tertentu agar peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan nilai pada dirinya dan menerapkan nilai tersebut dalam berpikir, bertindak, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dengan teman sekelas dan guru.

### **2. Program Pengembangan Diri**

Pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah dan melalui hal-hal sebagai berikut:

#### *a. Kegiatan rutin sekolah*

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah: upacara pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut dan lain-lain) setiap hari Senin, beribadah bersama/sembahyang bersama setiap dluhur (bagi yang beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucapkan salam bila bertemu guru/tenaga kependidikan yang lain dan sebagainya.

#### *b. Kegiatan spontan*

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus

dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga peserta didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. Contoh kegiatan tersebut adalah: membuang sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak sehingga mengganggu pihak lain, berkelahi, melakukan bullying, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak pada tempatnya dan sebagainya. Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang tidak baik dan yang baik sehingga perlu dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olahraga atau kesenian, berani menentang/mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji dan sebagainya.

*c. Teladan*

Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa maka guru dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan dan sebagainya.

*d. Pengkondisian*

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan tersebut. Sekolah harus mencerminkan kehidupan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai dalam budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. Misalnya toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur.

### **3. Budaya Sekolah**

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antar komponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah dimana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, pegawai administrasi dengan sesamanya dan antara satu kelompok anggota masyarakat sekolah dengan kelompok lainnya. Interaksi internal kelompok dan antar kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika profesi.

## **C. Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif**

Pengembangan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh-kembangkan sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, bernilai, dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercrepta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Seseorang yang

memiliki sikap dan jiwa wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya.

Wirausahawan adalah orang yang trampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Menurut Scarborough dan Zimmerer (1993:5), "*An entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on those opportunities* ---seorang wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan suatu bisnis dalam menghadapi risiko yang tidak menentu bagi tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi kesempatan-kesempatan dan merangkai sumber daya yang diperlukan untuk memodali kesempatan tersebut.

Meskipun konsep di atas menunjukkan seolah-olah kewirausahaan identik dengan kemampuan berbisnis, namun pada kenyataannya kewirausahaan tidak selalu identik dengan berbisnis semata-mata, karena sifat-sifat wirausahawanpun bisa dimiliki oleh setiap orang. Wirausaha mencakup semua aspek pekerjaan, baik karyawan swasta maupun pemerintahan (Soeparman Soemahamidjaja, 1980). Wirausahawan adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide, dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang (*opportunity*) dan perbaikan (*preparation*) hidup (Prawirokusumo, 1997).

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2001). Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Zimmerer (1996:51), nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Pengembangan teknologi baru (*developing new technology*)
2. Penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*)
3. Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (*improving existing products or services*)
4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*)

Walaupun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada peran pengusaha kecil, namun sifat inipun sebenarnya dimiliki oleh orang-orang yang berprofesi di luar wirausahawan. Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan dan tantangan, apapun profesinya. Dengan demikian, ada enam hakekat pentingnya kewirausahaan, yaitu:

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Sanusi, 1994)
2. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha (Prawiro, 1997)

3. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih.
4. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Drucker, 1959)
5. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, 1996)
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan.

Meredith dalam Pusposutardjo(1999), memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki jiwa wirausaha (*entrepreneur*) sebagai orang yang (1) percaya diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil risiko, (4) berjiwa kepemimpinan, (5) berorientasi ke depan, dan (6) keorisinalan. Ciri-ciri wirausaha dan bentuk ketatalakuan tampak pada tabel berikut.

Ciri-ciri Wirausahadan Bentuk Ketata-lakuannya

Ciri-ciri Kewirausahaan	Bentuk tata – kelakuan
Percaya diri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja penuh keyakinan</li> <li>2. Tidak berketergantungan dalam melakukan pekerjaan</li> </ol>
Berorientasi pada tugas dan hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kebutuhan akan prestasi</li> <li>2. Orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan tabah, tekad kerja keras.</li> <li>3. Berinisiatif</li> </ol>
Pengambil risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berani dan mampu mengambil risiko kerja</li> <li>2. Menyukai pekerjaan yang menantang</li> </ol>
Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka thd saran dan kritik.</li> <li>2. Mudah bergaul dan bekerjasama dengan orang lain</li> </ol>
Berpikir ke arah yang asli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreatif dan Inovatif</li> <li>2. Luwes dalam melaksanakan pekerjaan</li> <li>3. Mempunyai banyak sumberdaya</li> <li>4. Serba bisa dan berpengetahuan luas</li> </ol>
Keorisinilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpikiran menatap ke depan</li> <li>2. Perspektif</li> </ol>

Pendidikan ekonomi kreatif dirasakan sebagai suatu kebutuhan baru Bangsa Indonesia dalam menghadapi kehidupan ekonomi pasar bebas yang penuh persaingan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 dicanang pengembangan ekonomi kreatif melalui berbagai kementerian termasuk Kementerian Pendidikan Nasional (dalam Inpres tersebut

masih dinamakan Departemen Pendidikan Nasional). Kegiatan pengembangan tersebut dilakukan dari tahun 2009 – 2015.

Sesuai dengan posisi pendidikan dan kurikulum yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang harus dimiliki generasi muda untuk kehidupan kebangsaan masa mendatang, maka pengembangan kemampuan ekonomi kreatif sudah harus menjadi tugas kurikulum. Oleh karena itu penyempurnaan dan penguatan kurikulum yang akan datang perlu dan harus memasukkan unsur pendidikan ekonomi kreatif.

Pendidikan ekonomi kreatif dilakukan bukan melalui mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sebagaimana dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa, dan pendidikan kewirausahaan, maka pendidikan ekonomi kreatif dilakukan dengan mengembangkan potensi peserta didik dengan nilai-nilai yang menggambarkan manusia Indonesia baru yang memiliki kreativitas berorientasi ekonomi. Oleh karena itu pendidikan ekonomi kreatif dilakukan melalui pengembangan nilai dan kemampuan kreatif peserta didik.

Disamping nilai dan kemampuan kreatif, maka nilai-nilai dalam pendidikan kewirausahaan dan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang terkait dengan kemampuan berkreasi antara lain kemandirian, percaya diri, tangguh dalam bekerja, disiplin dapat dikembangkan untuk pendidikan ekonomi kreatif. Dengan perkataan lain, ketiga hal baru yang dikemukakan di bagian ini memiliki nilai-nilai yang berhimpit dan sama untuk pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia “baru” Indonesia.

## **BAB IX**

### **REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT**

#### **A. Rekomendasi**

1. Kurikulum SMA harus direalisasi dengan paradigma yang berorientasi pada kebutuhan belajar peserta didik, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mengembangkan potensi dirinya dengan memberi ruang kepada peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
2. Nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa, pendidikan kewirausahaan, dan ekonomi kreatif, perlu terintegrasi kepada seluruh aktivitas kurikuler di sekolah.
3. Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk memenuhi hak belajar peserta didik.
4. Peserta didik SMA berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
5. Perlu pemetaan kompetensi mulai dari PAUD dan Kelas I sampai dengan XII untuk menghindari pengulangan atau tumpang tindih yang tidak diperlukan, sehingga kompetensi yang sudah dipelajari di SD tidak dipelajari lagi di SMP dan seterusnya kompetensi yang sudah dipelajari di SMP tidak dipelajari lagi di SMA.

#### **B. Tindak Lanjut**

Penataan ulang kurikulum ini perlu segera ditindaklanjuti dengan dukungan kebijakan dan program teknis untuk mewujudkan kurikulum SMA yang lebih terbuka dan fleksibel dalam mengakomodasi tuntutan pengembangan potensi yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik.

Penataan ulang kurikulum di SMA dilakukan secara bertahap melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang.

##### **a. Jangka Pendek**

Memperkuat pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini di setiap sekolah melalui penguatan dengan metode pembelajaran aktif dan pengintegrasian pendidikan budaya dan karakter bangsa, pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan ekonomi kreatif.

##### **b. Jangka Menengah**

Mengkaji kurikulum dalam rangka pemetaan ruang lingkup materi dan kualifikasi kemampuan lulusan sebagai bahan penyempurnaan standar isi/standar kompetensi lulusan (SI/SKL).

**c. Jangka Panjang**

Merumuskan pengelolaan kurikulum masa depan yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah.

## KEPUSTAKAAN

- American Architectural Foundation. (2005). *Report from the National Summit on School Design*. Washington, DC: KnowledgeWorks.
- Armstrong, Bavid G. (1989). *Developing and Documenting the Curriculum*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Arnett, Jeffrey Jensen. (1999). "Adolescent Storm and Stress, Reconsidered." *American Psychologist*. Vol. 54, No. 5, 317-326.
- Dohm, A. & Shniper, L. (2007). *Employment Outlook: 2006-2016*. Washington, DC: Bureau of Labor Statistics.
- Glatthorn, Allan A. (1987). *Curriculum Leadership*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Co.
- Good, Thomas L. & Jere E. Broophy. (1990). *Educational Psychology: A Realistic Approach*. New York: Longman.
- Jerald, Craig D. (2009). *Defining A 21<sup>st</sup> Century Education*. Alexandria, VA: The Center for Public Education.
- Miller, John P. & Wayne Seller. (1985). *Curriculum: Perspectives and Practices*. New York: Longman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Saylor, J.G., Alexander, W.M., & Lewis, A.J. (1981). *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Trilling, Bernie & Charles Fadel. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass Publishing Co.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.